

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, N. S., & Harahap, M. I. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Eknmi dan Bisnis Vol. 1 No. 2, Mei 2022*, 48-55.
- Anggita, W. (2017). Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang). *Vol. 2 No. 01 2017*, 314-324.
- Ara, S. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit BPK. *JAFFA Vol. 04 No. 1 April 2016*, 1-17.
- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah Vol. 2 No.2, Juni 2019*, 76-91.
- Astriati, Y. D. (2022). Penerapan Gaya Kepemimpinan Berbasis Spiritual di Perusahaan Percetakan Mangrove Yogyakarta. *Upy Business And Management Journal Vol. 01, Issue 02, Juni 2022*, 35-42.
- Citra Rizki Amalia, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1*, 1-13.
- Fanggidae, H. C., & Manafe, M. W. (2019). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No. 2 Juni 2019*, 45-52.
- Fathiyah, Sumakna, A., Majid, H., & Masnun. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 6(April), 117–122. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>.
- Fatihudin, D. (2020). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*. Zifatama.
- Habibi, M., & Dkk. (2018). Politik Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1*, 269-282.
- Imam Mustaqim, T. (2019). Kinerja belanja modal Provinsi Riau: Struktur rasio dan tren. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Volume 14, Nomor 2*, 61-69.

- Kasih, Y. (2022). Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 19 Nomor 1, Juni 2022*, 15-22.
- Marzalita, & dkk. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Volume 3, No. 3*, 46-58.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015*, 33-43.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 11 No. 1*, 1-10.
- Pratama, Y., & Pikri, F. (2020). Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume 2. No. 2 Mei 2020*, 75-86.
- Putra, A. F., & Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 9 No. 1 Januari 2020*, 1-10.
- Saleh, R., & Andriana, N. (2021). Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kpp Pratama Bulukumba. *Jurnal Info Artha Vol.5, No.2, (2021)*, 130-139.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja . *K I N E R J A Vol. 15 No. 1, 2018*, 38-43.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011*, 46-58.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3, September 2013*, 74-81.
- Trisilia, M. (2016). Analisis Standar Belanja Untuk Penyusunan Rka-Apbd Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan (Studi pada SKPD di Pemerintah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015) . *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Vol. 4, No. 1, Oktober 2016* , 147-158.

Trisnawati, N. A., Burhanuddin, & Ferina, I. S. (2016). Efektivitas Realisasi Dan Serapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1 Januari 2016*, 37-54.

Umar, Z. (2016). Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014. *Jurnal Ilman Vol. 4 No. 1, Februari 2016*, 18-32.

Wirawan, S. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksiom Vol.18 No.2 (2019)*

Winerungan, T., Rumat, V. A., & Walewangko, E. N. (2018). Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun 2015-2017 (Studi Kasus Inspektorat Kota Bitung). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)*, 68-81.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts: 374/V/2018 Untuk Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.1075/IX/2019 Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau.

www.riapos.jawapos.com. (2021) Serapan APBN di Riau Belum Capai Targer Belanja Pegawai Rp2,09 T, Bansos Rp10,62 M.

www.goriau.com. (2020) Belanja Pegawai Pemprov Riau Lebih Besar dari Biaya Pembangunan Satu Kabupaten, tidak ada alasan berkinerja lambat.

Francisca (2022) Belanja Negara Rp 1.200 Triliun Belum Terserap *tempo.co.* tersedia di :<https://bisnis.tempo.co/read/1650520/belanja-negara-rp-1-200-triliun-belum-terserap-sri-mulyani-kalau-mungkin-dieksekusi-semua>, diakses 5 November 2022.